



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN IV JURAI

Jln. Jenderal Sudirman Sago-Salido Kode Pos. (25661)

KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI

NOMOR : 900/04 /Kpts-C.IV.J/IV/2023

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI AMPUAN LUMPO KECAMATAN IV JURAI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2023

CAMAT IV JURAI,

- Membaca** : Surat Wali Nagari Ampuan Lumbo Kecamatan IV Jurai Nomor : 400/08/WN-AL/IV/2023 tanggal 30 Maret 2023 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari Ampuan Lumbo Tahun Anggaran 2023;
- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan penjelasan pasal 2 ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic corona virus disease (Covid-19);
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan nagari yang dibahas dan disetujui bersama antara Wali Nagari dan Bamus Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari;
 - c. bahwa pendelegasian kewenangan melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari dan Rancangan Peraturan Nagari tentang rancangan APB Nagari kepada Camat atau sebutan lainnya, selanjutnya Camat membentuk tim evaluasi;
 - d. bahwa Pemerintah Kecamatan dalam fungsinya untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Nagari sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan yang mengatur Nagari;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a,b dan c tersebut diatas dipandang perlu menetapkan keputusan Camat IV Jurai tentang tim evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drl. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 nomor 77) jo Undang-Undang 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57)
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 17 tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 No 73);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 155);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- ~~13.~~ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 201/PMK-07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa; 11- 2022
15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
16. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat tahun 2007 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari Sebagaimana Telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Nagari;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari (Lembaran Daerah kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 Nomor 02);
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015 Nomor 62);
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015 Nomor 62);
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 tahun 2016

yg dibarengi nomor 8
11- 2022

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian tugas Jabatan Struktural Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 Nomor);

23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2017 Nomor);
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor ... tahun 2022 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2023;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor ... Tahun 2023 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari Serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 113 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 20.. tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari Di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2023;
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor ... Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

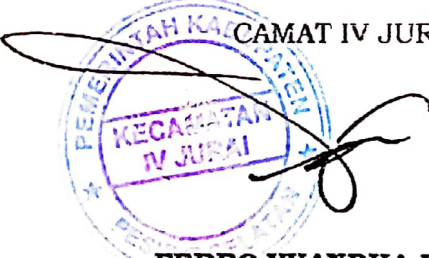
Menetapkan :

KESATU

: Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Ampuan Lumpo Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA** : Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindak lanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam hal Wali Nagari dan BAMUS Nagari tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Nagari, Maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.
- KEEMPAT** : Wali Nagari bertanggungjawab sepenuhnya/mutlak terhadap pelaksanaan APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi.
- KELIMA** : Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salido
pada tanggal 11 April 2023


CAMAT IV JURAI

FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP
NIP. 19850612 200412 2 001

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
6. Ketua BAMUS Nagari Ampuan Lumpo di tempat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI

NOMOR : 900/04 /Kpts-C.IV.J/IV/2023

TANGGAL : 11 APRIL 2023

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI AMPUAN LUMPO
KECAMATAN IV JURAI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NAGARI TAHUN ANGGARAN 2023**

A. UMUM

1. Alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai tentang APB Nagari Tahun Anggaran 2023 yaitu :

a. Pendapatan sebesar Rp.1.161.134.928,00.- dengan rincian :

- | | |
|---|-----------------------|
| 1) Pendapatan Asli Nagari sebesar | Rp. 00.- |
| 2) Dana Transfer sebesar | Rp.1.161.134.928,00.- |
| 3) Lain-lain Pendapatan Nagari Yang Sah sebesar | Rp. 800.000.00,- |

b. Belanja sebesar Rp. 1.168.654.624.11.- dengan rincian :

- | | |
|---|----------------------|
| 1) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari | Rp. 607.571.274.11.- |
| 2) Bidang pelaksanaan pembangunan Nagari | Rp. 271.797.750,00.- |
| 3) Bidang pembinaan kemasyarakatan Nagari | Rp. 43.000.000,00.- |
| 4) Bidang pemberdayaan masyarakat Nagari | Rp. 137.143.600.00.- |
| 5) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat | Rp. 109.142.000,00.- |

c. Pembiayaan sebesar Rp. dengan rincian :

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| 1) Penerimaan Pembiayaan | Rp. 22.519.696.11 |
| 2) Pengeluaran Pembiayaan | Rp. 15.000.000.00 |

2. Rancangan Peraturan Nagari Ampuan Lumpo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Ampuan Lumpo Tahun Anggaran 2023 yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Melalui Camat IV Jurai sudah ditandatangani oleh Wali Nagari Bersama BAMUS Nagari untuk dilaksanakan Evaluasi oleh Tim Kecamatan yang mendapatkan Limpahan Kewenangan dari Bupati Pesisir Selatan.

3. Dalam Rencana Kerja Pemerintah Nagari Ampuan Lumpo Tahun 2023 agar mencantumkan Pengalokasian Anggaran Belanja Nagari yang mendukung Program Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Prioritas Penggunaan Dana Nagari sesuai amanat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

B. PENDAPATAN

1. Pendapatan nagari yang dianggarkan dalam APB Nagari merupakan :
 - a. Perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
 - b. Seluruh pendapatan nagari dianggarkan secara bruto dalam APB Nagari, yaitu bahwa jumlah pendapatan nagari yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut.
 - c. Penganggaran Pendapatan asli Nagari merupakan Target minimal yang akan diterima satu tahun berjalan.

Dalam menganggarkan pendapatan, agar nagari mempedomani prinsip penganggaran pendapatan tersebut diatas.

2. Pada Pendapatan Nagari dianggarkan Pendapatan Asli Nagari sebesar Rp.,00.-.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, antara lain menyatakan bahwa penganggaran pendapatan nagari yang bersumber dari Pendapatan Asli Nagari (PAN) memperhatikan salah satunya yaitu mencantumkan dasar hukum pungutan nagari berkenaan dan dilarang menganggarkan pendapatan pungutan nagari yang belum ada dasar hukumnya meskipun potensinya ada.

3. Pada Rancangan Peraturan Nagari Ampuan Lumpo tentang APB Nagari Ampuan Lumpo Tahun Anggaran 2023 dianggarkan pendapatan yang berasal dari Dana Desa (APBN) sebesar Rp 1.161.134.928,00.- berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.
4. Pada Rancangan Peraturan Nagari Ampuan Lumpo tentang APB Nagari Ampuan Lumpo Tahun Anggaran 2023 dianggarkan pendapatan yang berasal dari Alokasi Dana Nagari (APBD) sebesar Rp. 466.271.342,00.- sudah sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
5. Pada Rancangan Peraturan Nagari Ampuan Lumpo tentang APB Nagari Ampuan Lumpo Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp. 11.010.586,00.- dengan rincian Bagi Hasil pajak Daerah sebesar Rp.5.286.188,00.- Bagi hasil retribusi daerah sebesar Rp.3.799.272,00.- dan Bagi hasil PBB P2 sebesar RP.1.925.126,00.-sudah sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

6. Anggaran Lain-lain Pendapatan Nagari yaitu Pendapatan Bunga Bank sebesar Rp 800.000,00,- menyesuaikan dengan kondisi nagari dan partisipasi masyarakat.

C. BELANJA

Belanja Nagari harus digunakan untuk pelaksanaan kewenangan Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari dan Belanja Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak berdasarkan prakarsa masyarakat, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten, kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten, hak asal usul, dan adat istiadat Nagari serta kewenangan lokal berskala Nagari.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, menyatakan bahwa Alokasi Dana kepada Nagari adalah untuk membiayai Program dan Kegiatan yang telah dituangkan dalam RPJM Nagari dan RKP Nagari dibahas dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari.

Mempedomani Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, antara lain menyatakan bahwa dalam rangka optimalisasi penggunaan Bantuan Keuangan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten tahun-tahun sebelumnya, yang belum dimanfaatkan dan/atau masih ada di rekening kas nagari sebagai SILPA Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Nagari harus menganggarkan kembali dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan peruntukan yang sudah disepakati bersama BAMUS Nagari pada tahun sebelumnya.

Adapun prinsip penggunaan Dana oleh Nagari untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala nagari yang diatur dan diurus oleh nagari, Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Belanja Bidang Pembangunan Nagari, Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari, Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Nagari sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari tersebut antara lain :

A. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Nagari :

- 1) Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Wali Nagari sebesar Rp. 51.600.000,00.- yang terdiri dari penghasilan tetap Wali Nagari sebesar Rp. 36.000.000,00,- dan tunjangan Wali Nagari sebesar Rp.15.600.000,00.-
- 2) Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Nagari sebesar Rp. 297.300.000,00.- yang terdiri dari penghasilan tetap

Perangkat Nagari sebesar Rp. 234.300,00,- dan tunjangan
Perangkat Nagari sebesar Rp.63.000.000,00,-

- 3) Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari
sebesar Rp. 3.751.740,- yang terdiri dari Jaminan sosial bagi kepala
desa dan perangkat Rp 3.751.740,-
- 4) Penyediaan Operasional Pemerintah Nagari sebesar
Rp. 21.357.222,-
- 5) Penyediaan Tunjangan Bamus sebesar
Rp. 68.700.000,-
- 6) Kegiatan Penyediaan Operasional Bamus sebesar
Rp. 11.227.193.00
- 7) Kegiatan Operasional pemerintah Desa yang bersumber dari dana
desa Rp 20.487.500,-

B. Pada kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Nagari :

- 1) Penyediaan Sarana (asset tetap) Perkantoran sebesar
Rp. 19.459.118,79,-

**C. Pada kegiatan Penyelenggaraan tata praja
pemerintahan,Perencanaan,Kuangan dan pelaporan.**

- 1) Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya(Musdus,renbug Desa
Non Reguler) Nagari sebesar Rp. 12.661.000,00,-
- 2) Pada kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan
Desa(RPJMDesa/RKPDesa dll)Sebesar Rp 7.571.000,-
- 3) Penyusunan Dokumen keuangan Desa(APBDDes Perubahan,LPJ dll)
Sebesar Rp.8.361.500,-
- 4) Pada kegiatan pengembangan sistem informasi Desa sebeesar
Rp.74.984.000,-
- 5) Pada kegiatan dukungan dan sosialisasi pelaksanaan
Pilkades,pemilihan Ka.Wilayahan & BPD sebesar Rp. 10.111.000,-

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari

A. Sub Bidang Pendidikan

- 1) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal
Milik Nagari sebesar Rp. 128.853.000,00,-

B. Sub Bidang Kesehatan

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kelas Ibu

Hamil, Lansia, Insentif) sebesar Rp. 82.722.750,00,-

- 2) Kegiatan pengasuhan bersama atau bina keluarga Balita (BKB) sebesar Rp. 10.900.000,00,-

C. Sub Bidang Kawasan Pemukiman

- 1) Kegiatan Pemeliharaan sanitasi pemukiman(gorong-gorong,Selokan,Parit di luar Prasarana jalan) sebesar Rp. 7.322.000,00,-
- 2) Kegiatan pembangunan /rehabilitasi/peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum dl' sebesar Rp 42.000.000,-

D. Sub Bidang kebudayaan dan keagamaan

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan festival Kesenian,adat/Kebudayaan,dan keagamaan(HUT RI,Raya Keagamaan sebesar Rp. 43.000.000,00,-

E. Sub Bidang Pertanian dan peternakan

- 1) Kegiatan peningkatan Tanaman Pangan(alat produksi/pengelolaan/penggilingan) sebesar Rp. 137.143.600,00,-

F. Sub Penanggulangan Bencana

- 1) Kegiatan Penanggulangan bencana sebesar Rp. 19.142.000,00,-
- 2) Kegiatan penanggulangan Keadaan Mendesak (BLT)sebesar Rp 90.000.000,-

6) PEMBIAYAAN

Pada Rancangan APB Nagari Ampuan Lumpo dianggarkan Pendapatan sebesar Rp. 1.161.134.928,00,- dan Belanja sebesar Rp. 1.168.654.624.11,- sehingga terdapat defisit sebesar Rp. 7.519.696.11,- Selanjutnya, juga dianggarkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2022 pada pos Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 22.519.696.11,- jadi, Pendapatan sudah balance dengan Belanja. Untuk seluruh kegiatan sudah sesuai dengan Peraturan yang berlaku dan berdasarkan kebutuhan serta kemampuan keuangan Nagari.